

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN COVID 19
DI KECAMATAN X KOTO DIATAS, KABUPATEN SOLOK**

Hilma Lathifah

IlmuAdministrasiNegara,FakultasIlmuSosial, Universitas NegeriPadang
hilmalathifah23@gmail.com

Abstract

This article aims to describe research findings in the form of collaborative governance functions (government collaboration) in response to covid 19 in X Koto Diatas District, Solok Regency; researchers describe the further analysis of collaborative governance (government collaboration) in handling Covid 19 in X Koto Di Atas District. Furthermore, the research objective was focused first on the collaborative process in dealing with Covid 19 in X Koto Di Atas District. The second concerns the supporting actors and obstacles to cooperation in handling Covid 19 in X Koto Di Atas District. In the research method, the researcher uses a descriptive qualitative research technique to select purposive sampling informants. The researcher collected the data using observation (going to the field), interviews, and documentation studies. It is known that the results of this study indicate that the government has an essential role in collaborating with the community and relevant stakeholders in collaborating to overcome covid 19 in the X Koto Di atas sub-district.

Keywords: Collaborative, Governance, Covid 19 handling

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian berupa fungsi collaborative governance (kolaborasi pemerintah) dalam penanggulangan covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, peneliti menggambarkan analisis lebih lanjut mengenai collaborative governance (kolaborasi pemerintah) dalam penanggulangan Covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas. Selanjutnya tujuan penelitian difokuskan pertama pada proses kolaborasi dalam penanggulangan Covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas. Yang kedua, mengenai aktor pendukung dan penghambat kerjasama dalam penanggulangan Covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas. Dalam metode penelitian peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif berupa pemilihan informan purposive sampling. Data dikumpulkan oleh peneliti dengan cara observasi (terjun ke lapangan), wawancara juga studi dokumentasi. Diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder terkait dalam melakukan kolaborasi guna menanggulangi covid 19 di kecamatan x koto diatas.

Kata kunci: Collaborative, Governance, Penanggulangan covid 19

Pendahuluan

Pada tahun 2019 lalu, dunia dibuat heboh dengan lahirnya wabah pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Wabah penyakit ini ditemukan pertama kali di kota wuhan Provinsi Hubei China. Dominasi dari pasien pneumonia ini berasalpedagangpenjual binatang hidup di pasar Huanan dikota wuhan. Kemudiantanggal 7 januari 2020 para ilmuanmengidentifikasi bahwa pneumomia tersebut disebabkan oleh novel coronavirus. Akhirnya WHO memberi namaresmi penyakit ini dengan Covid 19 (corona virus disease 2019).

Corona virus adalah warga virus yang penyebab penyakit pada manusia dan juga hewan. Penyebaran virus diawali dengan penularan hewan ke manusia, lalu kemudian penyebaran oleh manusia ke manusia. Cara penyebaran yang termasuk mudah ini, menyebabkan virus corona cepat menyebar hingga keseluruh dunia termasuk Indonesia. Hingga bulan Agustus 2021, pemerintah Indonesia telah merilis total sebanyak 4,19 juta jiwa kasus terkonfirmasi dan total 140 ribu jiwa kasus meninggal (covid19.go.id).

Pemerintah disaat wabah COVID-19 berperan menjadi manajemen sumber daya yang wajib untk bersifat terbuka, Bertanggung jawab serta dapat dipercaya. Pemerintah berkewajiban menyebarkan informasi kepada masyarakat dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Dalam tugas menghadapi pandemi Covid 19, pemerintah berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 mengenai Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid 19 sesuai yang tertera pada pasal 2 huruf b yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Collaborative governance merupakan kondisi yang mana pemerintah melakukan kolaborasi antar organisasi maupun individu dalam rangka memenuhi tujuan publik. Teori *collaborative governance* ini diterapkan oleh pemerintah Kecamatan X Koto Diatas dengan membangun hubungan kolaborasi bersama tim satgas Covid 19. Tidak dapat dipungkiri bahwa tim satgas Covid 19 dari puskesmas lebih menguasai permasalahan yang terjadi diakibatkan virus ini. sehingga pemerintah diharuskan untuk membangun kolaborasi karena mustahil bagi pemerintah untuk menanggulangi masalah ini sendiri. Pemerintah Kecamatan X Koto Diatas berkolaborasi dengan Tim Satgas Covid 19 yang terdiri dari tenaga kesehatan dari Puskesmas ditiap nagari. Kebijakan-kebijakan serta tindakan yang akan diambil dalam rangka menanggulangi dampak Covid 19 dilakukan secara bersama guna tercapai hasil yang maksimal. Kebijakan-kebijakan yang baik dan tepat juga diperlukan agar tujuan kolaborasi dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan *collaborative governance*, pemerintah bersama tim satgas Covid 19 menjalankan berbagai program yang sekiranya dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan dari diadakannya kolaborasi. Misalnya kegiatan sosialisasi bahaya Covid 19 yang diadakan guna mengedukasi masyarakat mengenai virus baru yang sedang berkembang ini. Kegiatan lainnya seperti kegiatan tracking yang dilakukan oleh pemerintah nagari bersama tim satgas Covid 19 kerumah warga yang terkonfirmasi positif Covid 19. Bentuk kolaborasi lainnya juga dapat dilihat dari bantuan pemerintah yang disalurkan oleh tim satgas Covid 19 berupa vitamin dan bahan pokok pada warga yang dikonfirmasi tertular Covid 19 dan diwajibkan untuk menjalani isolasi mandiri.

Dalam menerapkan konsep *collaborative governance*, masyarakat juga memiliki posisi aktif dalam upaya penanggulangan virus covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas. Untuk

menghambat penyebaran virus covid 19, pemerintah bersama masyarakat mendirikan pos jaga disetiap perbatasan nagari. Masyarakat yang dilibatkan disini yaitu warga yang dipilih dari tiap-tiap jorong di nagari tersebut untuk melakukan penjagaan di tiap perbatasan daerah. Pos yang dibuat ini hampir sama dengan bangunan pos ronda, hanya saja ditambahkan dengan portal untuk membatasi aktivitas keluar masuk masyarakat. Pos jaga ini beroperasi selama 24 jam dengan system piket yang beranggotakan perwakilan masyarakat, perwakilan pemerintah nagari dan perwakilan tim satgas covid 19. Namun kegiatan ini tidak berlangsung lama karena tingkat partisipasi masyarakat mulai berkurang seiring berjalannya waktu. Serta perwakilan dari pemerintah juga mulai disibukkan dengan urusan lainnya.

Untuk menjaga agar tempat-tempat umum seperti tempat ibadah dan pasar tetap steril, pemerintah kecamatan menugaskan tiap-tiap nagari untuk berkolaborasi dengan masyarakat melakukan penyemprotan desinfektan berdasarkan dosis yang ditetapkan oleh tim satgas (satuan tugas) covid 19. Dalam kegiatan ini, tim satgas covid 19 bertugas membuat desinfektan untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah nagari. Nantinya pemerintah nagari akan menyalurkan cairan desinfektan beserta alat semprot ketiap-tiap jorong di Kecamatan X Koto Diatas. Kegiatan penyemprotan ini akan dilakukan oleh hansip jorong bersama ketua jorong pada tempat-tempat ibadah disekitar wilayahnya. Akan tetapi tempat-tempat yang susah disterilkan ini bukannya dikosongkan untung beberapa waktu, malah kembali diisi dengan kegiatan lain. Misalnya pada bangunan masjid yang harusnya dikosongkan setelah penyemprotan justru kembali digunakan untuk kegiatan keagamaan.

Selain masyarakat, para pelaku usaha secara tidak langsung juga terlibat dalam upaya penanggulangan covid 19 ini. Keterlibatan ini dapat dilihat dari penempatan wastafel pada sudut pintu masuk toko. Pemilik toko juga hanya mengizinkan pelanggan yang memakai masker saja masuk kedalam tokonya.

Keterlibatan langsung para pelaku usaha dalam upaya penanggulangan covid 19 dapat terlihat dalam pengadaan konsumsi untuk pasien yang positif covid 19. Dalam pengadaan konsumsi bagi pasien covid 19 baik bagi yang melakukan isolasi mandiri di rumah atau juga dirawat di kamar inap puskesmas, pemerintah melakukan kerjasama dengan beberapa pedagang untuk menyalurkan dagangan mereka sesuai kebutuhan dapur puskesmas sulit air. Tidak semua pedagang dilibatkan disini. Hanya pedagang bahan-bahan pokok yang berdomisili di nagari setempat dan yang sudah memiliki NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak) yang dilibatkan. Terdapat beberapa masalah dalam pengadaan konsumsi ini. Seperti kelangkaan beberapa bahan pokok, dan kebutuhan tambahan lainnya seperti susu dan vitamin diakibatkan banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap barang tersebut. Kelangkaan ini mengakibatkan perubahan menu dan pengurangan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang positif covid 19.

Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. Bodgan dan juga Taylor (dalam moleong 2013:34) menjelaskan teknik penelitian kualitatif merupakan tata cara dalam penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berbentuk kata – kata tertulis atau juga lisan dari orang – orang dan perilaku yang di jadikan objek pengamatan. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yang nantinya akan menjelaskan fakta dalam bentuk gambar atau kata dan data yang akan dituangkan dalam

bentuk tulisan. Penelitian berlokasi di Kantor Camat X Koto Diatas dan Instansi Perangkat Daerah pendukung lainnya, kemudian pemilihan informan pada penelitian ini peneliti menggunakan cara purposive sampling. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan teknik tersebut dengan cara observasi (turun ke lapangan), wawancara dan juga studi dokumentasi.

Dalam menganalisa data penelitian, peneliti menggunakan langkah kerja dari Miles dan Huberman (1984) yaitu dengan cara mereduksi, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Sedangkan untuk uji keabsahan data yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Untuk selanjutnya mengetahui serta dapat menjamin keabsahan data, peneliti memakai teknik pemeriksaan untuk keabsahan data yang mana memeriksa secara seksama sejumlah data yang didapat selama di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Kolaborasi Dalam Penanggulangan Covid 19 Di Kecamatan X Koto Diatas

Untuk melihatnya bagaimana proses collaborative governance dalam penanggulangan covid 19 di kecamatan x koto diatas, peneliti menggunakan pendekatan teoritis dari Ansell dan Gash yang menyebutkan bahwa proses collaborative governance terdiri atas proses face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding dan juga intermediate outcomes.

Indikator tersebut akan dibahas sesuai dengan temuan penelitian berikut:

1.1. Proses Face to face dialogue

Menurut Ansell dan Gash, terjadinya *collaborative governance* dibangun menggunakan proses dialog atau bertatap muka antar masing-masing pemegang kepentingan (*stakeholder*). Orientasi yang didapat dari proses *collaborative governance* yaitu terletak pada hasil konsensus atau kesepakatan, oleh karena itu komunikasi menggunakan teknik tatap muka adalah tahapan yang penting sekali dalam suatu proses kolaborasi.

Berdasarkan penelitian yang lalu oleh Tri Harjanti (2016) dengan judul *collaborative governance* dalam rangka penanganan masalah pencemaran daerah aliran sungai (DAS) yang diakibatkan industri alkohol di desa ngombakan kecamatan polokarto kabupaten sukoharjo, bahwa proses dialog tatap muka diadakan dengan melakukan pertemuan langsung dengan para *stakeholder* yang terlibat untuk membahas tentang masalah pencemaran sungai yang diakibatkan limbah industri alkohol.

Sama juga dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang penanggulangan covid 19, bahwa pada tahapan face to face atau pada tahap dialog tatap muka yang diladakan antar *stakeholder* tentang pengenalan wabah virus covid 19 dan dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Dalam kegiatan tersebut, pihak puskesmas ditunjuk untuk menjadi narasumber pertemuan tersebut. Pengenalan atas virus ini sangat diperlukan agar nantinya secara bersama-sama dapat diputuskan langkah apa saja yang akan diambil nantinya.

Selain pengenalan mengenai virus covid 19, diperlukan pula suatu tim yang ditugaskan

secara khusus untuk menangani masalah ini. Dalam penanggulangan covid 19 ini dibentuk Tim Satgas atau satuan tugas Covid 19 tingkat kecamatan, Tim Satgas Covid 19 tingkat nagari yang nantinya akan berkolaborasi dengan Tim Satgas Covid 19 Puskesmas setempat. Keanggotaan dari tim ini diisi oleh *stakeholder* yang berkepentingan dalam penanggulangan covid 19 tersebut. Peran dari tiap-tiap aktor dalam dialog tatap muka sejalan dengan tujuan dari masing-masing instansi (lembaga) dalam penanggulangan covid 19 ini.

Berdasarkan penelitian yang sudah berlangsung, tim yang sudah dibentuk ini sangat membantu dalam memudahkan upaya penanggulangan covid 19 tersebut. Tim ini memberikan dampak bagi kelancaran informasi serta kebenaran informasi akan virus baru ini.

1.2. Trust building

Menurut Ansel dan juga Gash, dalam proses *collaborative governance* bukan hanya melakukan tahap negosiasi antar tiap aktor terkait, namun lebih fokus kepada membangun kepercayaan diantara masing-masing pemangku kepentingan. Karena disebabkan kurangnya kepercayaan antar para *stakeholder* dapat berdampak pada jalannya proses kolaborasi tersebut. Menurut pendapat De Seve dalam Sudarmo (2011:11) untuk melakukan pengukuran keberhasilan pada *collaborative governance*, salah satu diantaranya yaitu dengan adanya perasaan saling percaya diantara para aktor, dimana rasa saling mempercayai tersebut didasarkan terhadap hubungan profesional atau juga hubungan sosial. Termasuk keyakinan bahwa para aktor dapat mempercayakan informasi-informasi atau juga usaha-usaha dari para aktor lainnya dalam suatu jaringan agar dapat mencapai hasil tujuan bersama. Bagi setiap lembaga-lembaga pemerintah unsur ini paling esensial, karena mereka para lembaga harus yakin bahwa mereka dapat dipercaya terhadap partner-partner (rekan kerja yang adadalam jaringan) lainnya yang terdapat dalam suatu pemerintah dan partner-partner yang ada diluar pemerintahan untuk dapat menjalankan aktivitas-aktivitas yang sudah sebelumnya disetujui bersama.

Proses kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas yakni setiap aktor berfokus pada tugas dan fungsinya masing-masing. sehingga proses kolaborasi dalam tahap membangun kepercayaan masih belum terjalin satu dengan yang lain. Setiap aktor berkepentingan banyak berfikir tentang individualitas karena lebih mementingkan bagia tugas dan fungsinya masing-masing atau masih terdapat ego sektoral pada masing-masing aktor yang dilibatkan.

1.3. Commitment to process

Berdasarkan kesimpulan pada Ansell dan Gash, tingkatan komitmen antar *stakeholder* adalah penentu dari berhasil atau gagalnya suatu kolaborasi. Komitmen terhadap proses adalah suatu keyakinan bahwa dengan melalui proses kolaborasi akan bisa menciptakan keuntungan pada masing-masing pihak dan juga kepentingan publik. Komitmen pada proses artinya mengembangkan suatu keyakinan bahwa bermusyawarah merupakan cara terbaik untuk mencapai kebijakan yang diimpikan. Prosedurnya yang sudah jelas, adil dan transparan juga sangat penting dalam mendirikan komitmen.

Proses kolaborasi (kerja sama) dalam penanggulangan covid 19 dalam hal komitmen kepada proses yang dikerjakan oleh pemerintah, swasta ataupun masyarakat memiliki tujuan

yang juga sama dalam penanggulangan covid 19 yaitu meminimalisir penyebaran virus covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas. Sehingga dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen berbagai pihak dalam penanggulangan covid 19 ini berjalan dengan baik. Masing-masing pihak secara tersadar menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. tetapi pada proses kerjasama antar *stakeholder* belum berjalan dengan baik. Hal tersebut didasari pada kurangnya koordinasi antar para *stakeholder* terlibat penanggulangan covid 19.

1.4. Share understanding

Dalam kolaborasi pemerintah, para *stakeholder* harus mensamakan pemahaman dan persepsi pada tujuan yang akan dapat masing-masing capai secara bersama. Inilah yang dimaksudkan oleh ansel juga gash dengan share understanding. Saling memahami sendiri adalah kesepakatan tentang pemahaman yang relevan yang diperlukan dalam mengatasi suatu permasalahan.

Pada penelitian ini, share understanding sudah cukup optimal. Pengertian bersama yang dimiliki tiap-tiap pihak untuk menggapai tujuan bersama sudah berproses dengan semestinya. Instansi atau tim yang terkait dalam melakukan penanggulangan sudah menjalankan tugasnya sesuai kesepakatan. Kegiatan yang akan dijalankan juga sangat jelas, karena kesamaan tindakan pada tiap daerah (Nagari). Kesamaan tindakan yang akan diambil ini juga memberika keuntungan bagi para *stakeholder*. Jika mereka mengalami hambatan dalam mengambil tindakan, mereka dapat bertanya pada tim lain yang sudah melakukan tindakan tersebut lebih dulu.

1.5. Intermediate outcomes

Beberapa studi kasus memaparkan bahwa kolaborasi lebih gampang terjadi ketika tujuan juga keuntungan daripada kolaborasi relatif konkret sehingga memungkinkan untuk tercapainya keberhasilan. Intermediate outcomes diterjemahkan sebagai sebuah proses yang penting guna mendirikan momentum yang dapat memberika kesuksesan bagi sebuah kolaborasi. kesuksesan tersebut nantinya mampu memberikan feedback pada proses kolaboratif, menciptakan siklus yang baik untuk dapat membangun komitmen.

Dalam penanggulangan covid 19 ini, tujuan yang ingin dicapai ialah mengurangi penyebaran virus tersebut. Sehingga jumlah warga yang terinfeksi dapat diminimalisir dan dampak terburuk dari virus ini juga dapat dihindari. Meskipun tujuan dari penanggulangan ini belum dapat dicapai, namun upaya yang dilakukan sudah cukup optimal. Karena belum maksimalnya hasil yang dapat, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar aktor yang terlibat.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Kolaborasi Dalam Penanggulangan Covid 19 Di Kecamatan X Koto Diatas

2.1. Faktor yang mendukung kolaborasi

Faktor pendukung adalah suatu hal yang bisa jadi pendorong agar kegiatan tersebut mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung proses kolaborasi dalam penanggulangan covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas diantaranya:

a. Aktor yang terlibat dalam kolaborasi saling berkerjasama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerjasama menjadi kunci utama suksesnya suatu kolaborasi, tanpa kerjasama kolaborasi sudah dipastikan akan gagal. Dalam pelaksanaan kolaborasi di Kecamatan X Koto Diatas ini, tiap aktor menjalin kerjasama melalui komunikasi yang baik dan saling percaya antar berbagai aktor. Selain itu kesadaran masing-masing aktor yang terlibat dalam menjalankan tugasnya juga menjadi pendukung lancarnya proses kolaborasi tersebut.

b. Sumber Daya Manusia

Bantuan dari masyarakat dan pemuda dalam kolaborasi. Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa respon baik dari pemuda dan pedagang yang akhirnya dilibatkan dalam proses kolaborasi memberikan dampak yang baik dalam pelaksanaan penanggulangan tersebut.

2.2. Faktor penghambat kolaborasi

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat proses kolaborasi dalam penanggulangan covid 19 di Kecamatan X Koto Diatas adalah:

a. Dana yang disediakan kurang mencukupi untuk pelaksanaan upaya penanggulangan. Meskipun pemerintah sudah menyediakan dana tersendiri untuk penanggulangan covid 19, serta adanya tambahan dana dari anggaran nagari tetap saja tidak bisa menutupi kekurangan yang dialami selama proses kolaborasi berlangsung. Hal ini karena tingginya lonjakan kasus serta kenaikan harga barang-barang tertentu menyebabkan sulit untuk mengalokasikan dana dengan maksimal. Selain itu kelangkaan beberapa produk yang menyebabkan naiknya harga jual juga menjadi penyebab sulitnya mengatur perbelanjaan selama penanggulangan covid 19.

b. Terdapatnya ego sepihak dari masing-masing *stakeholder* terikat. Ego sektoral ini terjadi dikarenakan masing-masing aktor memfokuskan diri kepada tugas dan fungsinya sendiri. Hal ini berakibat pada lambatnya penyebaran informasi dan memperlambat petugas yang merekap data dalam melakukan perkerjaannya.

c. Peraturan pemerintah pusat yang sering berubah juga menjadi penghambat keberhasilan proses kolaborasi ini. Keharusan pemerintah daerah untuk mengikuti aturan dari pemerintah pusat menyebabkan sulitnya kolaborasi ini mencapai kata sukses. Hal ini karena, keputusan pemerintah pusat cenderung melihat perkembangan yang kasus yang terjadi di kota-kota besar yang tentunya memiliki banyak faktor pendukung. Sedangkan untuk di daerah, banyak hal yang harus disesuaikan dengan kondisi yang dialami saat ini sehingga tidak mudah untuk menyesuaikan diri secara cepat terhadap perubahan yang terjadi dari pusat.

Kesimpulan

Dalam menjalankan proses collaborative governance, pemerintah di kecamatan x koto diatas bekerjasama dengan tim satgas covid 19 dalam upaya penanggulangan covid 19. Tidak hanya pemerintah, kolaborasi ini juga melibatkan masyarakat serta stakeholder terkait lainnya agar tujuan utama dapat tercapai. Upaya yang dilakukan diantaranya pembagian masker dan handsanitizer, penyemprotan desinfektan pada rumah warga yang terkonfirmasi covid 19, kegiatan tracing terhadap pasien covid 19, pemberian sembako dan vitamin bagi keluarga yang positif covid 19 serta pembuatan pos penyekatan di perbatasan daerah.

Dalam menjalankan proses collaborative governance, kerjasama antar masing-masing aktor yang terlibat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan upaya ini. Selain itu bantuan dari masyarakat dan pemuda juga menjadi pendorong berjalannya kolaborasi ini. Namun keterbatasan dana serta seringnya perubahan aturan dari pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam menjalankan proses kolaborasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Kumorotomo, W. (2013). *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative governance Di Sektor Publik*. Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada.
- Balogh, dkk. 2012. *An Interative Framework for Collaborative governance*, Journal of Public Administration Research and Theory.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan KolaboratifIsu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media.
- Sudarmo dan Tika Mutiarawati. 2016. *Collaborative governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*. Jurnal Wacana Publik. Vol 1 No 2.
- Majid, A. I. (2021). *Interelation Institusional Collaboration Dalam Penanggulangan Bencana Covid 19 Di Kota Malang*.
- Riefkah, F. A. (2020). *Collaborative governance Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Banda Aceh* (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Wahyuni, S. (2019). *Kolaborasi Pemerintah Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kabupaten Bone*.
- Dewi, R. T. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog Dan Pertunjukan Reyog Di Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral Dissertation, UNS (Sebelas Maret University)
- Hardi, W. (2020). *Collaborative governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Swastini, A. (2010). *Collaborative governance Komisi Penanggulangan AIDS Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal Dalam Kasus HIV/AIDS Di Kota Surakarta*.
- Abiradin Rosidi dkk. 2013. *Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2013. *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM.
- Putri, A. R. (2021). *Proses Collaborative governance dalam Implementasi Program Konservasi Penyu di Desa Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat*.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan

- Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Surat Edaran No. 19 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, Dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Levani, Y., Prastya, A. D., & Mawaddatunnadila, S. (2021). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(1), 44-57.
Junaidi. (2015). *Collaborative governance* Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang, Tesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau.
Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P. F., & Audia, N. (2020). *Collaborative governance* Dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 Di Kota Padang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 4(1), 133-137.
Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. (2019). *Collaborative governance* Penanganan HIV AIDS Di Provinsi DKI Jakarta. *Sawala J. Adm. Negara*, 7(1), 1-11.
Bonso, H., & Irwan, I. (2021). *Collaborative governance* Dalam Penanganan Covid-19. *Journal Governance And Politics (JGP)*, 1(2), 1-9.
Fajri, H., Maani, K. D., Wahyuni, N., & Malau, H. (2021). *Collaborative governance* Sebagai Solusi Dalam Tata Kelola Pemberdayaan Nelayan. *Sosio Informa*, 7(2)